

## Studi Literatur Pengalaman Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Fasilitas Umum

Ariel Yehezkiel Silitonga<sup>1</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup>, Novridah Reanti Purba<sup>3</sup>,  
Veronika Valentin S. Garingging<sup>4</sup>, Emily Theresia Silaen<sup>5</sup>, Ira Selvia Ritonga<sup>6</sup>, Lince  
Tabitha<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: [ariel.4241260008@mhs.unimed.ac.id](mailto:ariel.4241260008@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>,  
[novridapurba1@gmail.com](mailto:novridapurba1@gmail.com)<sup>3</sup>, [vera.4243260008@mhs.unimed.ac.id](mailto:vera.4243260008@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>,  
[emilysilaen.4243260013@mhs.unimed.ac.id](mailto:emilysilaen.4243260013@mhs.unimed.ac.id)<sup>5</sup>, [iraselviartg.4241260018@mhs.unimed.ac.id](mailto:iraselviartg.4241260018@mhs.unimed.ac.id)<sup>6</sup>,  
[LinceTabitha.4243260011@mhs.unimed.ac.id](mailto:LinceTabitha.4243260011@mhs.unimed.ac.id)<sup>7</sup>

### Article History:

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 10 November 2025

Accepted: 27 November 2025

**Keywords:** Aksesibilitas,  
Penyandang Disabilitas,  
Fasilitas Umum

**Abstract:** Pemenuhan hak akses bagi individu dengan disabilitas adalah elemen penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman individu dengan disabilitas dalam mengakses layanan publik, seperti transportasi, gedung pemerintah, pusat kesehatan, lembaga pendidikan, hingga area publik lainnya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis studi literatur dengan mengkaji 10 artikel ilmiah dari dalam dan luar negeri yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Data diolah secara sistematis untuk menemukan hambatan, kondisi saat ini, dan kemungkinan perbaikan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas adalah hambatan fisik yang terkait dengan infrastruktur (seperti ramp, lift, guiding block, dan toilet khusus), serta hambatan non-fisik yaitu stigma sosial, minimnya informasi yang dapat diakses, dan tantangan kebijakan akibat lemahnya penerapan aturan. Sintesis dari literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang mendukung hak disabilitas dengan praktik layanan publik yang ada di lapangan. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari individu dengan disabilitas dalam proses perencanaan kebijakan, penerapan prinsip desain universal, dan peningkatan pengawasan terhadap standar aksesibilitas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, perencana kota, dan penyedia layanan untuk menciptakan fasilitas publik yang ramah dan setara bagi semua orang.

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan fundamental dan hak asasi manusia yang universal, yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warganya. Prinsip ini, yang menjadi landasan keadilan sosial, mengamanatkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai standar kesehatan tertinggi. Bagi penyandang disabilitas, pemenuhan hak ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kondisi mereka seringkali menuntut adanya fasilitas, layanan, dan akomodasi layak yang dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan mereka yang beragam. Tanpa dukungan ini, akses mereka terhadap hak-hak dasar termasuk kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial menjadi sangat terbatas.

Landasan hukum di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah secara eksplisit mengafirmasi hak mereka untuk mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang setara. Regulasi ini menggarisbawahi bahwa layanan publik harus aman, berkualitas, serta mudah diakses secara fisik maupun non-fisik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara amanat hukum dan implementasinya. Berbagai fasilitas krusial, mulai dari transportasi umum, gedung layanan publik, pusat kesehatan, hingga ruang terbuka kota, seringkali dibangun tanpa mempertimbangkan standar aksesibilitas universal. Kondisi ini menciptakan berbagai bentuk hambatan, seperti hambatan fisik berupa minimnya jalur landai dan toilet khusus, hambatan informasi akibat ketiadaan media braille atau pemandu audio, serta hambatan sosial yang lahir dari stigma dan diskriminasi di masyarakat. Akibatnya, penyandang disabilitas terhambat untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kualitas hidup dan kemandirian mereka.

Berbagai penelitian di Indonesia telah mendokumentasikan tantangan-tantangan ini dari berbagai sudut pandang dan lokasi yang spesifik, seperti di lingkungan perkotaan maupun di institusi publik tertentu. Meskipun studi-studi tersebut sangat berharga, temuannya cenderung terfragmentasi dan belum memberikan gambaran kolektif mengenai pengalaman penyandang disabilitas secara nasional. Untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif, mengidentifikasi pola-pola umum dari pengalaman tersebut, dan menemukan akar masalah yang sistemik, diperlukan sebuah sintesis dari berbagai temuan yang telah ada. Metode studi literatur menjadi pendekatan yang paling tepat untuk tujuan ini. Melalui tinjauan sistematis, peneliti dapat memetakan jenis hambatan yang paling dominan dilaporkan, menganalisis dampak psikososial yang paling sering muncul, serta mengidentifikasi area-area di mana penelitian lebih lanjut masih sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur guna mengkaji dan mensintesis berbagai hasil penelitian mengenai pengalaman penyandang disabilitas saat mengakses fasilitas umum di Indonesia. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat membentuk sebuah pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai lanskap permasalahan aksesibilitas dari sudut pandang mereka yang paling terdampak. Hasil sintesis ini tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga dapat menjadi landasan empiris yang kuat bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan advokat dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan inklusif untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

## **LANDASAN TEORI**

### **Disabilitas**

Disabilitas adalah segala kondisi tubuh atau pikiran yang membuat penyandang kondisi tersebut sulit untuk melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya (Dhamanti & Larasati, 2024). Dalam perbincangan internasional, penggunaan istilah penyandang disabilitas telah mengalami pergeseran waktu demi waktu. Pada masa sebelum abad ke-19, masyarakat menggunakan istilah *affliction* (penderitaan). Istilah ini digunakan oleh masyarakat sebagai gambaran atau asumsi mereka terhadap penyandang disabilitas.

Istilah tersebut telah menimbulkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Disabilitas selalu diidentikkan dengan penderitaan, korban, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Pada tahun 1976, WHO menyempurnakan panduan *International Classification of Diseases* dimana disabilitas dimasukkan ke dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit (Mustika & Pradikta, 2022).

### **Jenis-Jenis Disabilitas**

Jenis-jenis disabilitas diantaranya; pertama disabilitas kognitif, yaitu keterbatasan kapasitas otak sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam tahap perkembangan seperti *autisme* dan gangguan ADHD. Kedua disabilitas fisik, yaitu keterbatasan pada fungsi tubuh seperti tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan tuna wicara. Ketiga disabilitas sensorik, yaitu keterbatasan pada fungsi panca indra seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dan berbicara. Yang terakhir disabilitas mental yaitu keterbatasan akibat gangguan pada fungsi psikologis, pikiran, perilaku dan emosi seperti bipolar, gangguan kecemasan dan depresi (Rasilian et al., 2025).

### **Tanda-Tanda Disabilitas**

Secara sederhana seseorang dengan kelainan disabilitas dapat dikenali dalam dua aspek yaitu aspek fisik dan/atau aspek perkembangan. Disabilitas yang dikarenakan oleh aspek fisik mudah dikenali dengan perbedaan fisik, semisal: seseorang dengan tidak adanya anggota tubuh tertentu, kelainan pada penglihatan (tunanetra) dan seseorang dengan *Down syndrome*.

Disabilitas yang disebabkan oleh faktor perkembangan umumnya sulit dikenali dan memerlukan keterlibatan ahli tumbuh kembang untuk mendeteksinya. Oleh karena itu, orang tua perlu waspada apabila anak menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam aspek motorik, bahasa, kognitif, maupun personal-sosial, atau belum menguasai keterampilan yang seharusnya telah dikuasai anak seusianya (Nugroho, 2023).

### **Faktor-Faktor Penyebab Disabilitas**

Disabilitas daksa dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Pada tahap prenatal, disabilitas dapat muncul akibat gangguan genetik, kerusakan saraf pusat, anoxia, penyakit pada ibu, gangguan metabolisme, percobaan aborsi, benturan keras pada perut ibu, maupun infeksi virus. Pada tahap kelahiran, penyebabnya antara lain kesulitan persalinan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang kecil, pendarahan otak, kelahiran prematur, serta penggunaan alat bantu persalinan yang berisiko merusak fungsi otak bayi.

Sementara itu, pada tahap postnatal, disabilitas daksa dapat terjadi akibat penyakit berbahaya seperti meningitis, ensefalitis, difteri, dan pertusis yang merusak fungsi otak, maupun karena kecelakaan seperti benturan keras di kepala, terjatuh tanpa pelindung, atau kecelakaan lalu

lintas. Dengan demikian, penyebab disabilitas daksa sangat beragam dan dapat terjadi sejak masa kandungan hingga masa pertumbuhan atau dewasa (Widiyaningsih et al., 2025).

### **Aksesibilitas bagi Disabilitas**

Aksesibilitas merupakan kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas, karena dengan adanya aksesibilitas yang baik akan mempermudah penyandang disabilitas atau difabel dalam melakukan mobilitas. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas penting untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Cakupannya luas, tidak hanya pada bangunan atau fasilitas publik seperti transportasi, pasar, dan gedung pemerintahan, tetapi juga mencakup layanan pendidikan, kesehatan, hukum, serta pelayanan publik lainnya.

Regulasi di Indonesia, seperti Permen PU No. 30/PRT/M/2006 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah mengatur standar fasilitas publik yang ramah disabilitas, namun implementasinya masih minim. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan fisik (gedung, jalan, transportasi), kelembagaan (kebijakan dan aturan yang belum efektif), informasi, komunikasi, sikap masyarakat, hingga hambatan budaya (Darmadi et al., 2021).

Pengalaman diskriminasi seringkali didapatkan para penyandang disabilitas saat menggunakan transportasi umum. Para penyandang disabilitas netra dalam bentuk *low vision* juga sering mendapatkan pengalaman stigmatisasi. Penyandang disabilitas *cerebral palsy*, juga mengalami stigmatisasi. Mereka disebut 'orang gila' karena cara berjalan dan berbicara yang tidak sama seperti individu pada umumnya (Ahadiyah & Herawati, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur atau *literature review*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan yang membahas tentang pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas khusus disabilitas. Penelitian mengandalkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk dibandingkan, dan disintesis sehingga diperoleh gambaran mengenai permasalahan, faktor penghambat maupun pendukung, serta rekomendasi yang dapat diterapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman teoritis dan praktis yang lebih komprehensif sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka untuk dikembangkan pada studi berikutnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum. Data diperoleh melalui pengumpulan dan penelaahan jurnal, yang relevan dengan pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum. Selanjutnya, literatur yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kesenjangan informasi yang ada.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut (Raslian et al., 2025) Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang

berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model *Miles dan Huberman* yang terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses merangkum dan memilih hal-hal pokok dari sumber sekunder seperti jurnal dan literatur relevan, agar fokus pada data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kedua, penyajian data, yang dilakukan secara deskriptif dalam bentuk narasi sehingga hubungan antar data tetap terlihat dan dapat dipahami secara utuh sesuai konteksnya. Ketiga, verifikasi, yakni penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari simpulan sementara hingga verifikasi lebih lanjut untuk memastikan objektivitas, kemudian dibandingkan dengan makna konseptual dari permasalahan yang diteliti. Dengan tahapan ini, data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif.

### **Display Data**

Display data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka (studi literatur) dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum. Setiap literatur yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, tahun terbit (5 tahun terakhir), dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul disusun dalam bentuk narasi agar memudahkan pemahaman pola, kesenjangan informasi, dan pengalaman penyandang disabilitas sebagai fokus utama penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini ditemukan 30 artikel yang diperoleh dari Google Scholar maupun pencarian manual. Pencarian artikel menggunakan kata kunci "Disabilitas", "Aksesibilitas", "Fasilitas Umum", "Hambatan Penyandang Disabilitas", dan lain-lain. Setelah proses pencarian artikel kemudian disaring berdasarkan rentang waktu maksimal 5 tahun (2021-2025) sehingga didapatkan 27 artikel. Artikel disaring kembali dengan melihat keseluruhan sehingga didapatkan 10 artikel yang sesuai dengan topik berupa 8 jurnal Indonesia dan 2 jurnal Internasional.

### **1. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia**

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang mengatur hak disabilitas dengan implementasi di lapangan. Hambatan yang ditemukan bersifat multidimensional, mencakup hambatan fisik, di mana fasilitas publik seperti transportasi umum, gedung pelayanan, dan sarana kesehatan belum sepenuhnya ramah bagi pengguna kursi roda, tunanetra, maupun tunarungu. Selain itu, terdapat hambatan sosial berupa stigma dan diskriminasi yang masih sering terjadi, baik dalam interaksi di masyarakat maupun di lingkungan birokrasi. Dari sisi kebijakan, banyak institusi pelayanan publik belum serius menerapkan prinsip inklusivitas karena keterbatasan anggaran dan lemahnya pengawasan. Penyandang disabilitas juga seringkali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka (Pramashela & Rachim, 2021).

### **2. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas mereka terhadap fasilitas publik. Hambatan-hambatan tersebut mencakup aspek fisik seperti akses terhadap bangunan, transportasi, dan jalan umum; hambatan sosial berupa stigma dari masyarakat; serta

hambatan kebijakan yang disebabkan oleh kurangnya penerapan aturan dan pengawasan yang efektif. Akibat dari berbagai hambatan ini, penyandang disabilitas belum dapat menikmati fasilitas publik secara adil dan setara (Maspaitella et al., 2024).

### 3. Hak Layanan Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Jakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Jakarta belum optimal. Ditemukan berbagai hambatan, termasuk hambatan fisik berupa kurangnya akses di sarana transportasi umum dan gedung-gedung publik, hambatan sosial dalam bentuk stigma dan diskriminasi yang masih terjadi, serta hambatan birokratis yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan yang sudah ada (Sianipar & Trustisari, 2024).

### 4. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Studi kasus di Kabupaten Tangerang ini menemukan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik. Hambatan tersebut meliputi hambatan fisik seperti gedung pelayanan yang tidak ramah kursi roda serta minimnya fasilitas khusus di transportasi dan ruang publik. Selain itu, ditemukan juga hambatan sosial berupa rendahnya sensitivitas petugas pelayanan serta hambatan kebijakan akibat kurangnya program khusus dan minimnya alokasi anggaran untuk fasilitas disabilitas (Kolyubi et al., 2024).

### 5. Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Layanan Transportasi Publik: Studi Literatur Di Berbagai Negara

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa hambatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses transportasi publik bersifat umum dan beragam. Hambatan tersebut mencakup hambatan fisik, seperti minimnya fasilitas jalur landai, *lift*, *signage braille*, atau fasilitas audio untuk tunanetra dan tunarungu. Ditemukan pula hambatan teknis, di mana sistem transportasi seringkali tidak kompatibel dengan alat bantu yang digunakan penyandang disabilitas seperti kursi roda atau tongkat. Selain itu, ada pula hambatan sosial dan budaya, seperti masih adanya diskriminasi, rendahnya empati, dan kurangnya pelatihan bagi petugas transportasi (Arianto & Apsari, 2022).

### 6. The Accessibility for People with Disabilities In Realizing Inclusion-Based Services At The Asian-African Conference Museum

Hasil penelitian menunjukkan museum ini telah berupaya mewujudkan layanan inklusif, namun masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek fisik, akses masuk, jalur kursi roda, dan toilet khusus belum sepenuhnya memadai. Dari aspek informasi, ketersediaan media alternatif seperti braille, *audio guide*, atau bahasa isyarat masih minim. Sementara dari aspek sumber daya manusia, staf museum belum terlatih secara khusus untuk melayani pengunjung disabilitas (Jamilah & Zulaikha, 2022).

### 7. Penyediaan Fasilitas Umum Terhadap Penyandang Disabilitas

Penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak fasilitas umum baik itu transportasi, gedung pemerintahan, sekolah, maupun sarana

kesehatan belum ramah bagi penyandang disabilitas. Kesimpulannya, penyediaan fasilitas umum masih belum maksimal karena implementasi kebijakan yang lemah. Jurnal ini menekankan perlunya komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat, dan peran aktif dari penyandang disabilitas agar aksesibilitas dapat benar-benar terwujud. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan implementasi kebijakan, alokasi anggaran khusus, penerapan prinsip *universal design*, serta pelibatan langsung komunitas disabilitas dalam perencanaan (Lobo et al., 2024).

#### **8. Pelayanan Ketersediaan Fasilitas Publik Untuk Masyarakat Penyandang Disabilitas.**

Penelitian ini menemukan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses fasilitas publik karena ketersediaannya belum merata dan belum sesuai standar aksesibilitas. Hambatan fisik terlihat dari minimnya jalur kursi roda dan sulitnya menjangkau transportasi umum. Dari aspek informasi, fasilitas publik jarang sekali menyediakan media alternatif seperti huruf *braille* atau panduan suara. Dari sisi kebijakan, kelemahannya terletak pada minimnya pengawasan pemerintah dan kurangnya anggaran khusus. Meskipun begitu, terdapat perkembangan positif di beberapa kota besar yang mulai menerapkan prinsip desain universal dalam pembangunan fasilitas umum (Zulkiflia et al., 2024).

#### **9. Navigating Higher Education Challenges: A Review Of Strategies Among Students With Disabilities In Indonesia**

Hasil riset menunjukkan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi Indonesia menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan fisik akibat infrastruktur kampus yang belum ramah disabilitas, hambatan akademik karena materi dan metode pengajaran yang tidak inklusif, hambatan sosial berupa stigma, hingga hambatan psikologis seperti tekanan mental dan perasaan terisolasi. Meski demikian, mereka mampu mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan, antara lain memanfaatkan teknologi pendukung, membangun dukungan sosial, melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak mereka, serta mengandalkan motivasi internal untuk menyelesaikan studi (Rahajeng et al., 2024).

#### **10. Analisis Ketersediaan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Berbagai Negara**

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sangat bervariasi antar negara. Negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara Eropa telah berhasil menerapkan standar desain universal sehingga lebih ramah bagi disabilitas. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi banyak keterbatasan dari sisi infrastruktur, alokasi anggaran, maupun kesadaran masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa kendala terbesar terletak pada lemahnya implementasi kebijakan, meskipun regulasi dan komitmen internasional sudah ada (Ainul Maghfiroh & Imam Rizaldi, 2022).

Berdasarkan sepuluh jurnal yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik masih jauh dari optimal. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan fisik (minimnya jalur kursi roda, toilet khusus, lift, dan transportasi ramah disabilitas), hambatan sosial (stigma dan diskriminasi), hambatan informasi (kurangnya *braille*, audio guide, bahasa isyarat), serta hambatan kebijakan (lemahnya

implementasi regulasi, minim anggaran, dan rendahnya kesadaran aparatur).

Meskipun terdapat sejumlah inisiatif positif seperti penerapan desain universal, jalur khusus, dan program inklusif di beberapa kota maupun instansi, pelaksanaannya masih terbatas. Beberapa negara maju telah berhasil menerapkan standar aksesibilitas lebih baik, sementara Indonesia dan negara berkembang lainnya masih tertinggal karena keterbatasan sumber daya.

Di sisi lain, mahasiswa disabilitas menunjukkan strategi adaptif yang kuat dalam menghadapi hambatan akademik dan sosial. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik nyata masih lebar, sehingga diperlukan komitmen politik, kolaborasi lintas sektor, serta pelibatan aktif komunitas disabilitas untuk mewujudkan layanan publik yang benar-benar inklusif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum di Indonesia masih belum optimal. Hambatan yang dialami penyandang disabilitas muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hambatan fisik berupa keterbatasan jalur kursi roda, toilet khusus, guiding block, serta sarana transportasi yang ramah disabilitas, hingga hambatan informasi seperti ketiadaan media braille, panduan suara, dan interpreter bahasa isyarat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan implementasi regulasi melalui alokasi anggaran khusus dan penerapan prinsip *universal design* dalam pembangunan fasilitas publik. Pelibatan komunitas penyandang disabilitas di setiap tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi penting agar hasilnya sesuai kebutuhan. Selain itu, edukasi bagi masyarakat dan aparatur publik perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan sikap inklusif serta mengurangi diskriminasi. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi disabilitas juga harus diperkuat, didukung dengan penelitian berbasis data lapangan guna menghadirkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahadiyah, D. N., & Herawati, E. (2024). Pengalaman dan Kehidupan Keseharian Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 351–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3723>
- Ainul Maghfiroh, & Imam Rizaldi. (2022). Analisis Ketersediaan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Berbagai Negara. *Binawan Student Journal*, 4(3), 13–20. <https://doi.org/10.54771/bsj.v4i3.655>
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2022). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- Darmadi, D., Rania, G., & Setiawan, A. R. D. F. A. B. (2021). Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100–112. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i2.329>
- Dhamanti, I., & Larasati, A. (2024). Disabilitas dan Keselamatan Pasien : Studi Literatur. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 10(1), 15–23. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol10.iss1.1443>
- Jamilah, A. Q., & Zulaikha, R. (2022). The Accessibility for People With Disabilities in Realizing Inclusion-Based Services At the Asian-African Conference Museum. *Jurnal*

- Pendidikan Inklusi*, 5(2), 56–67.
- Kolyubi, A., Amiruddin, S., & Riswanda, R. (2024). Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 106–115. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.198>
- Lobo, F. N., Rosmaniar, A., Abigail, P., Leba, M., Dawa, R., Sae, F. C., & Poto, B. (2024). Penyediaan Fasilitas Umum Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 363–368.
- Maspaitella, S. V., Piris, H. J., & Tita, H. M. Y. (2024). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik. *CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review*, 2(2), 77–84.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>
- Nugroho, F. W. (2023). *Buku Edukasi Pengasuhan Anak dengan Disabilitas* (B. Dayanti (ed.)). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Rahajeng, U. W., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2024). Navigating Higher Education Challenges: A Review of Strategies among Students with Disabilities in Indonesia. *Disabilities*, 4(3), 678–695. <https://doi.org/10.3390/disabilities4030042>
- Rasilian, D., Kurniawan, W., Taufik, M. L., & Wulandari, N. S. (2025). *Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan: Kompetensi Keahlian Layanan Keperawatan dan Caregiving* (1st ed.). PT. Adab Indonesia.
- Sianipar, S. T. S. A. P., & Trustisari, H. (2024). Hak Layanan Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Jakarta. *Indonesian Journal of Social Science (IJSS)*, 2(2), 11–21.
- Widiyaningsih, W. A. S. P. W. R., Lamatenggo, R. Y. N., Anwar, S., Dawenan, H. F., & Waroka, I. D. (2025). *Kolaborasi Disabilitas Dan Olahraga (Mobilisasi NPC)* (1st ed.). DEEPUBLISH DIGITAL.
- Zulkiflia, Z. R., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2024). Pelayanan Ketersediaan Fasilitas Publik Untuk Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur). *Jurnal Respon Publik*, 18(6), 50–61.